



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 12 Desember 2019.
Pukul	: 14.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan mengenai Ujian Nasional TA 2020 dan Zonasi. 2. Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2020.
Hadir Komisi X DPR RI	: 47 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Mendikbud RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh **H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

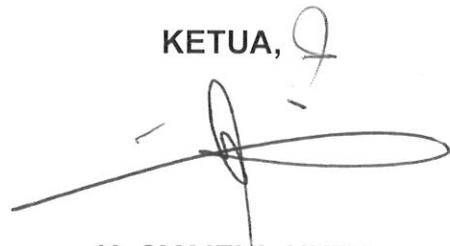
1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud RI terhadap konsep perubahan mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Zonasi dengan catatan:
 - a. Penggantian Ujian Nasional akan dilaksanakan pada Tahun 2021.
 - b. Kemendikbud RI menyampaikan hasil kajian komprehensif kepada Komisi X DPR RI sebelum ditetapkan menjadi kebijakan Pemerintah.

- c. Kemendikbud RI menyiapkan *grand design* dan *roadmap* pendidikan termasuk mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei/pemetaan karakter dengan memperhatikan kemampuan dan distribusi guru, sarana prasarana, dan peserta didik.
 - d. Kemendikbud RI mengarahkan survei/pemetaan karakter untuk pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila.
 - e. Kemendikbud RI memperhatikan dan mengawasi perbaikan infrastruktur/sarana prasarana pendidikan.
 - f. Komisi X DPR RI mendukung kebijakan fleksibilitas proporsi PPDB mulai tahun 2020.
 - g. Hasil Asesmen Kompetensi harus disertai rekomendasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah.
 - h. Kemendikbud RI melakukan revitalisasi kemampuan guru antara lain melalui pemberdayaan komunitas belajar.
2. Terhadap persiapan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan sikap sebagai berikut:
- a. Mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kemenkeu RI agar pengelolaan atau pengawasan anggaran fungsi pendidikan yang berada di K/L lain dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dalam bentuk transfer daerah.
 - b. Mendesak Pemerintah untuk memastikan alokasi DTU “yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan” ditegaskan hanya untuk pendidikan.
 - c. Mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), khususnya dalam pemanfaatan dana riset dan hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
3. Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota Komisi X DPR RI paling lambat 13 Januari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 21.20 WIB

KETUA,



H. SYAIFUL HUDA